

KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE 2015-2020

¹⁾Chiata Liandry Safitri, ²⁾Sri Supadmini

¹⁾ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi “YKP”, ²⁾ STIE Nusa Megarkencana

¹⁾ chiataliandry@gmail.com, ²⁾ s.supadmi70@gmail.com

Abstract

Regional autonomy is the right, authority, and obligation of an autonomous region to regulate and manage its own government affairs and the interests of the local community in accordance with statutory regulations. The implementation of regional autonomy is intended so that local governments are able to encourage the community to participate in carrying out development by empowering the resources they have, and using them for the benefit of the wider community and can provide good services to the community. The purpose of this study is to analyze the financial performance of the regional government of East Kalimantan Province in 2015-2020. The types of secondary data in the form of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) and the Budget Realization Report are sourced from www.bpkad.kaltimprov.go.id. The data collection method uses the documentation method with qualitative descriptive data analysis methods and the government's financial performance is analyzed with local government financial ratios including the ratio of the degree of fiscal decentralization, regional independence, regional dependence, PAD effectiveness, spending efficiency, harmony and growth. The results of the study show that the financial performance of the regional government of East Kalimantan Province in 2015-2020 is generally classified as good. The ratio of the degree of fiscal decentralization is very good, the independence ratio is independent of the delegative pattern, the effectiveness ratio of PAD with very effective criteria, the ratio of expenditure efficiency with budget efficiency criteria, the ratio of operating expenditure compatibility with the matching criteria and the growth ratio is quite good, but still has weaknesses in regional dependency ratio, and compatibility of capital expenditures.

Keywords : Local, Government, Financial, Performance, APBD

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Latar belakang diterapkan otonomi daerah di Indonesia adalah adanya tuntutan dari masyarakat atas ketidakpuasan sistem sentralisasi yang diterapkan pada masa orde baru yang tidak memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggunakan dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki untuk sehingga menimbulkan ketergantungan yang besar pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Pergeseran bentuk pemerintahan dimulai setelah adanya reformasi tahun 2008 yaitu diberlakukannya otonomi daerah dimana pelaksanaannya didasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian digantikan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan terakhir mengalami perubahan dengan ditetapkannya UU no 23 tahun 2014, dimana perubahan undang-undang ini mengakibatkan terjadinya pergeseran politik desentralisasi ke arah resentralisasi atau dengan kata lain menyeimbangkan antara desentralisasi dengan dekonsentrasi. Resentralisasi dilakukan secara legal formal, sistematis dan konstruktif, dimana pemerintah pusat telah menarik kembali kewenangan daerah yang menjadi hak otonom dan pemerintah pusat membuat aturan teknis (juklak dan juknis), sehingga daerah selalu mengalami ketergantungan kepada pusat dan akhirnya daerah kehilangan kreativitas dan inovasi yang bermuatan lokal. (Azikin, 2018).

Perubahan format baru dari otonomi daerah menjadi kesempatan baik bagi pemerintah daerah untuk dapat memberdayakan sumber daya yang dimilikinya, dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat luas dan bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi yaitu penyerahan urusan, tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Desentralisasi di bidang pemerintahan adalah menyerahkan kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah pusat ke daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut (Khusaini, 2021) menyatakan bahwa APBD pada hakekatnya merupakan salah satu instrument kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah sesuai dengan tujuan otonomi daerah. APBD memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Pertanggungjawaban pelaksanaan otonomi daerah melalui laporan realisasi anggaran perlu adanya pengukuran kinerja maka dari itu pemerintah memerlukan alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kinerja dan akuntabilitas kinerja daerah, salah satunya dengan menilai laporan realisasi anggaran daerah tersebut. Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana pemerintah dapat mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan baik. (Halkadri, 2019).

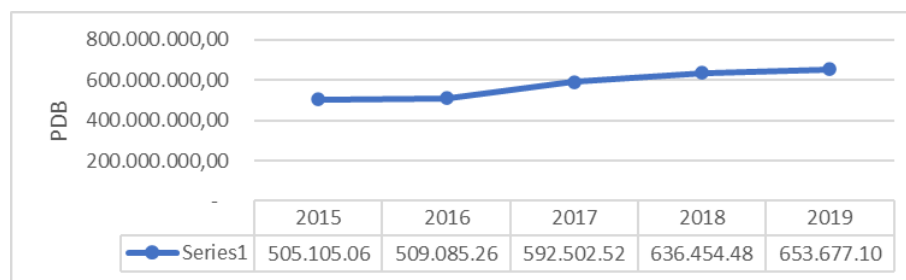
Pengukuran kinerja penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efektif, efisiensi, dan ekonomis (Mardiasmo, 2018). Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rasio keuangan daerah diantaranya rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian, rasio ketergantungan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi belanja, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan (Mahmudi, 2019).

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu pemerintah daerah yang telah melaksanakan otonomi daerah berupa pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sering disebut sebagai lokasi calon ibu kota baru pengganti DKI Jakarta. Dari sisi ekonomi, Kalimantan Timur sangat mengandalkan sektor pertambangan karena merupakan penyumbang penerimaan terbesar serta sumber daya batu bara yang cukup besar tetapi selama beberapa bulan harga batu bara mulai merosot mengakibatkan menurunnya kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan penyelenggara pemerintah serta pelayanan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2015-2016, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tercatat negatif yang dimana pada tahun 2015 sebesar -1,2% dan 2016 mengalami peningkatan laju pertumbuhan ekonomi menjadi -0,38%, Pada tahun 2017, perekonomian Kalimantan Timur terus meningkat menjadi 3,13%, pada tahun 2018 terjadi penurunan laju pertumbuhan menjadi 2,67%. Pada tahun 2019, perekonomian Kalimantan Timur tumbuh sebesar 4,77% dan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 1,27%. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur 2015-2020 dapat terlihat pada Gambar 1



Gambar 1
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2015-2020
Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id/index.php/home>

Sementara Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015-2019 ditunjukkan pada Gambar 2



Gambar 2
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2015-2020
Sumber: <https://sidata.kaltimprov.go.id/index.php/home>

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pemerintah daerah Kalimantan Timur pada Gambar 2 pada tahun 2015-2019 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya tahun 2015 sebesar Rp 505.105,06, tahun 2016 sebesar Rp 509.085,26, tahun 2017 sebesar Rp 592.502,52, tahun 2018 sebesar Rp 634.454,48 dan tahun 2019 sebesar Rp 635,677,10.

Pada awal Februari 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang berlangsung hingga saat ini memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian di berbagai wilayah di dunia maupun di Indonesia. Pandemi Covid-19 mengharuskan masyarakat di berbagai daerah untuk melakukan pembatasan sosial sehingga dapat menekan penyebaran Covid-19, akibat kebijakan tersebut aktivitas ekonomi menjadi terhambat sehingga berdampak pada kinerja sektor ekonomi dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut akan memberikan dampak juga bagi pengelolaan keuangan daerah. Dengan peningkatan PDRB dan fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi Pemerintah daerah Kalimantan timur tentu akan berdampak pada kinerja keuangan selama tahun 2015-2020.

B. KAJIAN LITERATUR

Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Autos* (sendiri) dan *Nomos* (hukum atau aturan). Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang No.32 tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia, 2004). Berdasarkan pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar

permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa (Lembaran Negara Republik Indonesia, 1945). Pelaksanaan pemerintah daerah yang menjadi urusan daerah dilakukan dengan otonomi seluas-luasnya. Dengan otonomi daerah yang seluas-luasnya, maka daerah akan lebih leluasa untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri berdasarkan potensi dan kemampuan daerah sehingga daerah akan lebih cepat dalam mencapai tujuannya yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Tujuan otonomi daerah menurut (Wulandari, 2018) adalah agar :

1. Tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat sehingga jalannya pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan lancar.
2. Pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi daerah pun dapat diberi hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya.
3. Kepentingan umum suatu daerah dapat diurus lebih baik dengan memperhatikan sifat dan keadaan daerah yang mempunyai kekhususan sendiri.

Prinsip-prinsip yang berlaku dalam otonomi (Wulandari, 2018) adalah :

1. Prinsip otonomi seluas-luasnya, artinya daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan terhadap bidang politik luar negeri, keamanan, moneter, agama, peradilan serta fiskal nasional.
2. Prinsip otonomi nyata, artinya daerah diberikan kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.
3. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab, artinya otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Menurut (Mahmudi, 2019) rasio kinerja keuangan daerah yang digunakan sebagai tolak ukur menilai kinerja keuangan adalah:

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.
2. Rasio Kemandirian Daerah
Rasio Kemandirian Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.
3. Rasio Ketergantungan Daerah
Rasio Ketergantungan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

4. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya.

5. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio Efisiensi Belanja menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

6. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi biaya dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti presentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Pada rasio keserasian, penilaian kinerja diukur berdasarkan 2 rasio yaitu:

a. Rasio Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam suatu tahun anggaran berjalan, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya porsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%.

b. Rasio Belanja Modal

Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan jangka panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20%.

7. Rasio Pertumbuhan.

Rasio pertumbuhan daerah dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Pertumbuhan pendapatan daerah diharapkan dapat mengimbangi laju inflasi.

b. Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Belanja daerah memiliki kecenderungan untuk naik, kenaikan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian dengan inflasi, perubahan nilai tukar rupiah, perubahan cakupan pelayanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif.

Penelitian (Ropa, 2016) menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan masih kurang baik pada rasio efisiensi, rasio kemandirian, dan rasio aktivitas yang disebabkan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah masih rendah dan masih memprioritaskan alokasi pada belanja operasi, sementara penelitian (Nufus. Khayatun, 2017), Kinerja Pemerintah daerah Tangerang Selatan dapat dikatakan cukup baik dimana rasio kemandirian sangat baik dengan pola delegatif sehingga sudah tidak ada campur tangan pemerintah pusat dalam membiayai kegiatan pembangunan dan yang lainnya, rasio efisiensi sangat efisien dan rasio keserasian sudah cukup baik, tetapi untuk rasio efektivitas dapat dikatakan tidak efektif.

C. METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah dengan unit penelitiannya adalah pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur. Unit analisis yang digunakan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Periode 2015-2020 dan Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Periode 2015-2020. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Periode 2015-2020 dan Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Periode 2015-2020. Data bersumber dari laporan yang dipublikasikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada website resmi www.bpkad.kaltimprov.go.id dengan teknik dokumentasi.

Penelitian berikut bersifat deskriptif kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam bentuk uraian naratif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan lapangan dan apa yang dialami oleh responden akhirnya dicarikan rujukan teorinya (Sujdarwo, 2011)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan dapat tersaji pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1
Rasio Keuangan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Periode 2015-2020

NO	Keterangan	Tahun						Rata-rata	Kriteria
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	52.3	50.50	56.2	54.4	55.7	52.2	53.55	Sangat Baik
2	Rasio Kemandirian Daerah	110	102.10	129.1	119.5	126.4	109.5	116.10	Delegatif
3	Rasio Ketergantungan Daerah	47.6	49.40	43.6	45.5	44	47.7	46.30	Tinggi
4	Rasio Efektifitas PAD	97.2	102.80	110.1	113.1	113.1	122.3	109.77	Sangat Efektif
5	Rasio Efisiensi Belanja	90.6	93.70	90.6	89	83.3	82.2	88.23	Efisiensi Anggaran
6	Rasio Keserasian belanja operasi	68.5	70.30	82.8	70.7	81.4	78.2	75.32	Serasi
7	Rasio Belanja modal	31.4	29.70	17.2	29.3	18.6	18	24.03	Kurang Serasi
8	Rasio Pertumbuhan Pendapatan		-18.50	2.1	23.5	9.4	-16.2	0.06	Positif
9	Rasio Pertumbuhan Belanja		-17.10	2.9	14.7	3.8	-8.8	(0.90)	Negatif

Sumber: www.bpkad.kaltimprov.go.id, Data Diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 1 kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015-2020 berdasarkan rasio derajat desentralisasi fiskal adalah sangat baik dengan rata-rata sebesar 53,54% mempunyai kriteria sangat baik, walaupun rasio derajat desentralisasi fiskal dibebarnya tahun mengalami mengalami fluktuasi dimana penurunan terjadi pada tahun 2016, 2018 dan 2020. Penurunan derajat desentralisasi fiskal terjadi karena penurunan pendapatan pada pada pos pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah yang disebabkan peningkatan tingkat suku bunga, melemahnya perekonomian nasional yang ditandai penurunan kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika dan pengaruh penurunan ekonomi global yang disebabkan adanya penurunan harga komoditas CPO, batu bara, dan minyak dunia yang sangat berpengaruh pada pendapatan daerah karena bidang pertambangan menjadi penyumbang terbesar Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan terakhir terjadi pandemi Covid-19 di tahun 2020 yang berdampak dilakukannya pembatasan kegiatan sosial ekonomi dan membuat aktivitas dunia usaha berjalan lambat. Sumbangan terbesar yang berdampak pada peningkatan kinerja keuangan berdasarkan derajat desentralisasi fiskal berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Adanya fluktuasi derajat desentralisasi fiskal selama tahun 2015- 2020 tetapi kinerja keuangan secara keseluruhan tergolong kriteria sangat baik artinya kemampuan pemerintah daerah didalam menyelenggarakan desentralisasi untuk meningkatkan PAD guna membiayai pembangunan sudah baik.. Hal ini terlihat dari penerimaan antara PAD dan pendapatan daerah semakin meningkat yang berarti Pemerintah Daerah provinsi Kalimantan Timur mampu menggali potensi PAD sehingga dapat melampaui anggaran anggaran yang telah ditetapkan dibeberapa tahun khususnya dari pos pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

2. Rasio Kemandirian Daerah

Kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015-2020 yang berdasarkan rasio kemandirian daerah adalah baik dengan rata-rata sebesar 116,1% dengan pola hubungan delegatif menunjukkan kemampuan keuangannya tinggi, meskipun selama periode tersebut mengalami fluktuasi pada tahun 2016, 2018 dan 2020 tapi secara keseluruhan menunjukkan kemampuan keuangan sangat baik. Pola hubungan delegatif dimana kemampuan pemerintah daerah tinggi dalam membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari pos pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah tergolong tinggi sehingga campur tangan pemerintah pusat berkurang dan Provinsi Kalimantan Timur mampu mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Kemandirian Pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur ditunjukkan dengan adanya kontribusi besar PAD lebih tinggi daripada pendapatan transfer yang diberikan pemerintah pusat dan dan capaian PAD beberapa tahun melampaui anggaran yang telah ditetapkan kecuali pada tahun 2016 dan 2018, sementara pos pendapatan transfer pada tahun 2015, 2017 dan 2019 tidak dapat mencapai anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Rasio Kemandirian sangat baik hal ini ditunjukkan dengan realisasi PAD melampaui anggaran dan adanya penurunan pendapatan transfer sehingga secara ekonomi semakin mampu membiayai kebutuhan daerahnya dari daerahnya sendiri.

3. Rasio Ketergantungan Daerah

Kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015-2020 berdasarkan rasio ketergantungan daerah kurang baik dengan rata-rata menunjukkan angka 46,3% dengan kriteria tinggi. Hal ini berarti pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan terhadap proporsi pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang tinggi. Adanya fluktuasi rasio ketergantungan daerah disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan transfer yang berasal dari bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam dan pos-pos lainnya, dana alokasi umum dan dana bantuan pos keuangan. Pendapatan transfer 2016 dan 2020 mengalami penurunan dan pada 2017 dan 2019 pendapatan transfer berada dibawah anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur perlu meningkatkan kinerja berdasarkan rasio ketergantungan dengan lebih mengoptimalkan potensi daerahnya berasal dari pajak, retribusi dan sumber daya alam lainnya.

4. Rasio Efektivitas PAD

Kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015-2020 berdasarkan rasio efektivitas menunjukkan kinerja sangat baik dengan rata-rata rasio efektivitas sebesar 109,7% dengan kriteria sangat efektif. Kinerja rasio efektivitas PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan walaupun pada awalnya pada tahun 2015 menunjukkan kurang baik yaitu pada kriteria cukup efektif yang disebabkan tidak tercapainya anggaran PAD berasal dari pos-pos pendapatan bea balik kendaraan bermotor, penurunan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari penerimaan realisasi bagi laba atas penyertaan modal pada BUMD yang disebabkan melemahnya perekonomian nasional yang ditandai dengan melemahnya kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika dan adanya pengaruh ekonomi global dimana menurunnya harga komoditas CPO, batu bara, dan minyak dunia juga disertai peningkatan bunga pinjaman sehingga pada tahun 2015 kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan PAD belum mencapai dengan yang ditargetkan pada tahun 2015, tetapi pada tahun 2016-2020 mengalami peningkatan, hal menunjukkan bahwa pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur mampu merealisasikan penerimaan PAD sudah sesuai dengan yang ditargetkan di setiap tahunnya atau sudah sangat efektif dalam mengalokasikan dana yang masuk maupun tepat dalam pengelolaan dana yang keluar sehingga tahun 2016-2020 pos PAD selalu melebihi anggaran.

5. Rasio Efisiensi Belanja

Kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015-2020 berdasarkan rasio efisiensi belanja adalah berkinerja baik dengan angka rata-rata 88,23% dengan kriteria efisien anggaran Kinerja selama tahun 2015-2020 mengalami trend peningkatan karena adanya usaha efisiensi biaya belanja sehingga realisasi belanja mengalami penurunan yang lebih besar dibanding dengan anggaran belanja sehingga mengurangi terjadi pemborosan, semakin kecil persentase rasio efisiensi menunjukkan semakin efisien karena semakin efisien memanfaatkan pendapatan yang dimiliki. Pada tahun 2016 persentase mengalami kenaikan tetapi masih dibawah seratus persen, hal ini menunjukkan pemerintah daerah tidak melakukan pemborosan. Efisiensi dicapai oleh Pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur karena setiap tahunnya realisasi total belanja tidak melampaui anggaran yang telah ditetapkan.

6. Rasio Keserasian

Kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015-2020 berdasarkan rasio keserasian menunjukkan kinerja kurang baik, kinerja ini ditunjukkan berdasarkan rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Rasio belanja operasi Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2015-2020 dengan rata-rata sebesar 75,32% dengan kriteria sesuai menunjukkan kinerja yang baik, tetapi rasio belanja modal dengan rata-rata 24,7% dengan kriteria kurang sesuai. Pada rasio belanja operasi dan belanja modal kinerja mengalami fluktuasi disebabkan adanya kenaikan dan penurunan pos belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, dan bantuan sosial dan belanja peralatan, mesin, tanah dan bangunan yang disebabkan adanya penghematan sebagai dampak fluktuasi penerimaan pendapatan daerah yang disebabkan kelesuan ekonomi secara nasional yang berakibat penurunan pendapatan daerah baik pendapatan asli daerah (PAD) pada pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari penerimaan realisasi bagi laba atas penyertaan modal pada BUMD yang disebabkan melemahnya perekonomian nasional, dan pendapatan transfer. pada rasio belanja operasi yang membutuhkan pengeluaran besar pada pos belanja pegawai karena kenaikan penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tenaga kependidikan serta kenaikan belanja insentif pemungutan retribusi daerah, pemberian beasiswa Pendidikan, pembelian pakaian dinas, atribut karyawan. Pada rasio belanja modal tidak mencapai anggaran yang telah ditetapkan sehingga

menyebabkan pemerintah daerah melakukan penyesuaian baik biaya belanja operasi dan modal agar tidak terjadi pemborosan.

7. Rasio Pertumbuhan

Kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015-2020 berdasarkan rasio pertumbuhan cukup baik. Kinerja rasio pertumbuhan dinilai berdasarkan 2 rasio yaitu rasio pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja. Pada rasio pertumbuhan pendapatan selama tahun anggaran 2015-2020 mempunyai kinerja cukup baik karena mengalami fluktuasi pertumbuhan pendapatan dengan kecenderungan naik. Penurunan kinerja rasio pendapatan terbesar terjadi pada tahun 2016 dan 2020, tahun 2016 terjadi penurunan pendapatan yang signifikan khususnya PAD dan pendapatan asli daerah yang disebabkan oleh adanya penghematan dari PT Pertamina yang ada di Balikpapan, terjadi PHK karyawan karena banyak perusahaan tambang batu bara yang tutup, menurunnya penerimaan DBH pajak bumi dan bangunan dari sektor migas, menurunnya rencana produksi dan luasan hutan Kalimantan Timur dan pada tahun 2020 penurunan kembali terjadi adanya penurunan penerimaan realisasi pajak daerah dan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Hal ini berarti menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mempertahankan dan meningkatkan pendapatan daerahnya walaupun masih rendah sehingga tercipta pertumbuhan pendapatan. Kinerja pada rasio pertumbuhan belanja menunjukkan kinerja yang cukup baik karena terdapat trend penurunan yang diakibatkan adanya usaha efisiensi belanja sebagai penyesuaian adanya penurunan pos pendapatan. Penurunan pertumbuhan belanja disebabkan oleh menurunnya pos-pos belanja daerah seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja bantuan sosial pada tahun 2016, kalau pada tahun 2020 disebabkan oleh menurunnya belanja hibah.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pada masing-masing rasio maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015-2020 secara keseluruhan tergolong baik. Hal ini ditunjukkan pada rasio derajat desentralisasi fiskal sangat baik, rasio kemandirian dapat dikatakan sudah mandiri atau berada dalam pola delegatif, rasio efektivitas PAD dengan kriteria sangat efektif, rasio efisiensi belanja telah melakukan efisiensi anggaran, rasio keserasian dimana rasio belanja operasi dengan kriteria serasi dan rasio pertumbuhan yang cukup baik dengan rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan nilai positif sementara pada rasio pertumbuhan belanja yang menghasilkan nilai negatif menunjukkan adanya peningkatan pendapatan dan penurunan belanja, tetapi Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki kelemahan pada rasio ketergantungan daerah, dan rasio keserasian belanja modal. Pada rasio ketergantungan daerah menunjukkan ketergantungan masih tinggi kepada pemerintah pusat terkait pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Pada rasio belanja modal pemerintah daerah cenderung lebih mengalokasikan belanja daerahnya untuk belanja operasi dibandingkan belanja.

F. REFERENSI

- Azikin, A. (2018). Makna Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Era Reformasi. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 5(1), 35–41.
- Halkadri, F. (2019). *Analisis Neraca Dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. CV IRDH.
- Khusaini, M. K. A. dan G. M. (2021). *Manajemen Belanja Daerah* (Cetakan Pe). Malang : UB Press.
- Lembaran Negara Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar 1945* (Vol. 105, Issue 3).
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>

- Lembaran Negara Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Tentang Otonomi Daerah*. 1–3.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi Keem). UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Terb). CV Andi Offset.
- Nufus. Khayatun, H. S. dan A. M. (2017). Analysis of Financial Performance of Local Government through South Tangerang Calculation of Realization Regional Budget. *European Journal of Business and Management*, Vol 9, No.
- Ropa, M. O. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4 (2): 738.
- Sujdarwo. (2011). *Metodologi Penelitian Sosial*. Mandar Maju.
- Wulandari, P. A. dan E. I. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. DEEP PUBLISH.